



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	25 (<i>dua puluh lima</i>)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Menteri Investasi/Kepala BKPM
Hari, Tanggal	:	Rabu, 22 September 2021
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Menteri BUMN RI : <ol style="list-style-type: none">1. Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022;2. PMN Tahun 2022 dan Usulan Tambahan PMN Tahun 2021. Menteri Investasi/Kepala BKPM : <ol style="list-style-type: none">1. Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022;2. Kesiapan Kementerian Investasi BPKM menjalankan PP No.5 Tahun 2021 dan update Investasi Dalam Negeri .
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. 42 orang dari 54 orang Anggota Komisi VI DPR RI.2. Menteri BUMN RI, Erick Thohir.3. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahilil Lahadalia. berserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi/Kepala BKPM pada pukul 10.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 22 September 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN RAPAT

1) KEMENTERIAN BUMN RI

1. Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp208.245.675.000 (*Dua Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp75.117.609.000 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja barang sebesar Rp131.983.066.000 (*Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja Modal sebesar Rp 1.085.000.000 (*Satu Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui terkait tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan KMK No. 298 tahun 2021 sebesar Rp16.900.000.000.000,- (*Enam Belas Triliun Sembilan Ratus Miliar Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Utama Karya sebesar Rp9.000.000.000.000,- (*Sembilan Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk tambahan dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
 - b. Waskita Karya sebesar Rp7.900.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Sembilan Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan sebagai penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi serta digunakan untuk modal kerja dan investasi jalan tol.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri BUMN RI terkait Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perum Perumnas yang akan digunakan dalam upaya memperbaiki struktur permodalan untuk melanjutkan program pengadaan "Satu Juta Rumah" bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp1.570.000.000.000 (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah*).
 - b. PT PLN (Persero) yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa sebesar Rp5.000.000.000.000 (*Lima Triliun Rupiah*).

- c. PT Utama Karya (Persero) yang akan digunakan dalam penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatera dengan target tambahan panjang 162 KM sebesar Rp23.850.000.000.000 (*Dua Puluh Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).
 - d. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang akan digunakan dalam penyelesaian ruas tol Kayu Agung–Palembang–Betung dan ruas tol Bogor–Ciawi–Sukabumi sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*).
 - e. PT Adhi Karya(Persero) Tbk. yang akan digunakan dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya–Kulonprogo dan Yogyakarta Bawen serta SPAM Regional Karian-Serpong sebesar Rp1.980.000.000.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan PMN dalam cadangan pembiayaan investasi Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*)
 - b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp3.500.000.000.000,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*)
 - c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp1.980.000.000.000,- (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
 - d. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

2) KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

1. Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 711.513.546.000,- (*Tujuh Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 2 (*dua*) program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp300.901.232.000,- (*Tiga Ratus Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp410.612.314.000,- (*Empat Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui pengajuan penambahan anggaran dari Kementerian Investasi/BKPM dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp600.000.000.000,- (*Enam Ratus Miliar Rupiah*) untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.200.000.000.000.000,- (*Seribu Dua Ratus Triliun Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk mengimplementasikan OSS Berbasis Risiko secara efektif, melakukan pengawasan dengan ketat dan melakukan penyempurnaan sistem OSS sehingga implementasi OSS Berbasis Risiko dapat meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia secara berkualitas.

4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.52 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



ARIA BIMA
A-189 